

Bahan bincang-Bincang di Ruang Tengah Bangka Pos

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

KLA

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

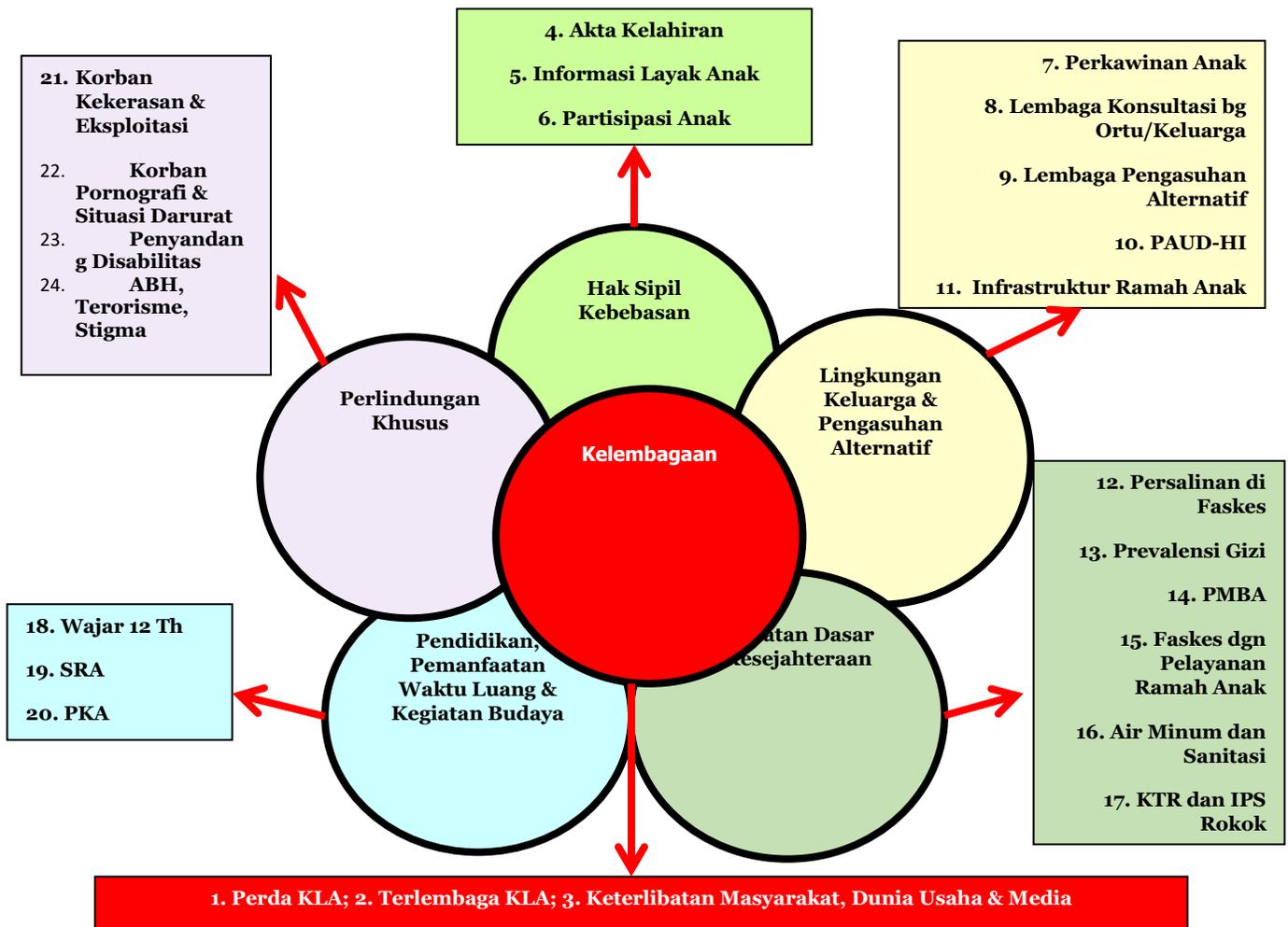
Pengembangan KLA diawali dengan adanya lokakarya Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi Indonesia, Indonesian People Forum dengan dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 13 Mei 2004. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Seminar Nasional Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Arsitektur) dengan dukungan dari Yayasan Pelangi Indonesia, 12 Oktober 2004. Setelah itu diskusi secara intens dan lobi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan memasukan “Kebijakan Pengembangan Kota Ramah Anak” ke dalam perencanaan program Asisten Deputi Masalah Sosial, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Ramah Anak di Bogor pada akhir Desember 2005.

Inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PP-PA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 2015 oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan mengikuti Evaluasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memperoleh predikat KLA Pratama.

Perlindungan Anak dilakukan dengan pendekatan inklusif dan kepentingan terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai generasi emas Indonesia untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa.

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak meliputi klaster-klaster penting sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan kelembagaan
- b. Klaster :
 1. Klaster 1 Hak sipil dan kebebasan,
 2. Klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
 3. Klaster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
 4. Klaster 4 Pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi,
 5. Klaster 5 Perlindungan khusus.



Dalam rangka implementasi Perlindungan Anak diperlukan dukungan dan peran dari segenap komponen meliputi pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa. Untuk itu sinergitas dalam perlindungan anak perlu diupayakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip pengembangan KLA diantaranya adalah:

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik untuk anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak
- Tata pemerintahan yang baik

Klasifikasi KLA

1. KLA Pratama
2. KLA Madya
3. KLA Nindya
4. KLA Utama
5. KLA

Klasifikasi Provila

1. Provinsi Penggerak KLA
“Seluruh Kabupaten/Kota Mengikuti Evaluasi KLA dengan perolehan nilai di atas 500”
2. Provinsi Pelopor KLA
“Seluruh Kabupaten/Kota mendapat Predikat KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK”

KLA Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

1. KLA PRATAMA
 - a. Kabupaten Bangka
 - b. Kabupaten Belitung
 - c. Kota Pangkalpinang
2. KLA MADYA
 - a. Kabupaten Bangka Tengah

Percepatan KLA

- KOMITMEN KEPALA DAERAH SANGAT UTAMA.
- PEMBANGUNAN ANAK (KLA) bukan hanya dilakukan oleh Dinas PPPA; tetapi oleh semua stakeholders pelaksana 24 Indikator KLA:
 - Pemda: Provinsi dan Kabupaten/Kota (PD), Desa/Kelurahan
 - Lembaga-lembaga: DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, Polri
 - Non Pemerintah: Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Media Massa, dll
 - AGAR PEMBANGUNAN ANAK dilaksanakan OPTIMAL, maka perlu lebih fokus pada upaya-upaya PENCEGAHAN → untuk menekan biaya pelayanan (relatif mahal; karena anak sudah terlanjur menjadi korban).

Produk Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya perlindungan Anak

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengarustamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Layak Anak Tahun 2020 – 2025
10. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/592/DP3ACSKB/2019 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

11. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/187/DP3ACSKB/2020 tentang Pembentukan dan Penunjukan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (didalamnya ada PATBM)
14. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan

1. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak tanggal 18 April 2018
Peserta : Bupati/Walikota, Bappeda Kab/kota, DPPPA Kab/kota, BKKBN, PD Prov., Media Massa, LM, Dunia Usaha
2. Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 29 April – 1 Mei 2018
Peserta : Forum Anak
3. Pelatihan Fasilitator/Kader PATBM tanggal 16-17 Juli 2018
Peserta : Dinas PPPA, aktivis PATBM, Dinas Kesehatan, kementerian Agama/KUA,
4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 31 Juli 2018
Peserta : Biro hukum, media massa, Lembaga masyarakat, kementerian agama, RSUD Prov, Dinas PPPA, PATBM, KPAD
5. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 31 Juli 2018
Peserta : Biro hukum, media massa, Lembaga masyarakat, kementerian agama, RSUD Prov, Dinas PPPA, PATBM, KPAD
6. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 31 Juli 2018
Peserta : Biro hukum, media massa, lembaga masyarakat, kementerian agama, RSUD Prov, Dinas PPPA, PATBM, KPAD
7. Pelatihan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak tanggal 9-10 Agustus 2018
Peserta : Dinas PPPA, P2TP2A, Kecamatan, Lembaga Masyarakat, PKDRT, Peksos.
8. Peringatan hari Anak Nasional tanggal 23 September 2018
Peserta : Gubernur, Ketua TP PKK prov, Forkopimda, Dinas PPPA, Dunia Usaha, LM, Forum Anak
9. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak tanggal 23 November 2018

- Peserta, PD Provinsi, Dinas PPPA Kab/Kota, LM, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat
10. Advokasi, KIE dan Pembentukan Forum Anak Bangka Belitung tanggal 10 Desember 2018
Peserta : Forum Anak
 11. Pelatihan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Bagi Tenaga Kesehatan tanggal 18-20 Februari 2019
Peserta : Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Balai POM, IDI Babel, IBI Babel, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
 12. Rapat Koordinasi Provila tanggal 1 Maret 2019
Peserta : Gubernur, Forkopimda, Bupati/Walikota, PD Prov dan Kab/kota, LM, Dunia Usaha, Media Massa, kementerian Agama, para Camat dan Kepala Desa/Lurah.
 13. Forum Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24-26 April 2019
Peserta : Forum Anak
 14. Bimbingan Teknis Satgas PPA Kabupaten/Kota tanggal 28-30 Juli 2019
Peserta : Satgas PPA Kab/Kota
 15. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Korban KDRT/TPPO tanggal 15 Agustus 2019
Peserta : Kejati, Pengadilan Tinggi, UPPA Polda, Peradi, Kejari, Pengadilan Negeri, UPPA Polres, Advokat/Pendampping Hukum.
 16. Pelatihan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dengan analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi Tim TAPD dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota tanggal 19-20 Agustus 2019
Peserta : Bappeda, Dinas PPPA, Bakuda
 17. Bimbingan Teknis SDM Bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tanggal 29 Agustus 2019
Peserta : UPTD PPA Prov, Dinas PPPA
 18. Peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 September 2019
Peserta : Gubernur, ketua Tp PKK prov, Forkopimda, Dinas PPPA kab/kota, Dunia Usaha, LM, Forum Anak
 19. TOT bagi aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), 3 angkatan
Peserta : Aktivis PATBM

20. Bimbingan Teknis Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dengan analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi Tim TAPD dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota tanggal 30-31 oktober 2019
Peserta : Bappeda, Bakuda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA
21. Bimtek Satgas PPA Kabupaten/Kota tanggal 30 oktober – 1 November 2019
Peserta : satgas PPA
22. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak tanggal 2 November 2019
Peserta : Bappeda, Bakuda, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Para Camat.
23. Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak yang membahas tentang Sosialisasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tanggal 26 November 2019
Peserta : Dinas PPPA, DWP, PKK, Guru BK, Konselor/Psikolog
24. Rapat Advokasi dan Pembinaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kebijakan Forum Anak Kab/Kota tanggal 28 November 2019
Peserta : Bappeda, Dinsos, Dinkes, Dindik, Bakuda, DPPP
25. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak tanggal 4 Februari 2020
Peserta : Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
26. Rapat Koordinasi Pemenuhan hak Anak tanggal 9-11 Maret 2020
Peserta : PD Provinsi dan Kabupaten/Kota
27. Bimtek KHA dan SRA bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan tanggal 20-21 Juli 2020
Peserta : Dinas PPPA, Tenaga Pendidikan

Komponen – Komponen KLA

1. Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak
2. Forum Anak
3. Lembaga Pengasuhan Anak
4. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
5. Perkawinan Anak
6. Pekerja Anak
7. Ruang Bermain Ramah Anak
8. Pasar, Terminal, Tempat Ibadah Serta Sarana Prasarana Lain Yang Ramah Anak
9. Zona Selamat Sekolah dan Rute Aman Selamat Sekolah
10. Puskesmas Dan Rumah Sakit Ramah Anak
11. Sekolah Ramah Anak

12. Wajib Belajar 12 Tahun
13. Kecamatan Dan Desa Layak Anak
14. Penanganan Kasus Anak Yg Komprehensif